

## ABSTRAK

Jauhary, Jund Robby Syaja' Al,12103193165, Implementasi Kebijakan Kepolisian Dalam Menindak Pengemudi Dibawah Umur Di Kabupaten Tuban Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2023, Pembimbing Satrio wibowo, M.H.

**Kata Kunci :** Kebijakan, Kepolisian dan Pengemudi

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Kebutuhan serta perkembangan zaman yang begitu meningkat memberikan ruang gerak dalam memenuhi kebutuhan kehidupan. Pengendara beroda dua bukan hanya di pengemudikan oleh orang yang sudah layak namun juga anak-anak dibawah umur yang belum layak untuk mengemudi dan dapat ditemui diberbagai daerah, seperti anak-anak sekolah dengan jangkauan jarak yang jauh tanpa diantar oleh orang tuanya karena berbagai faktor, sehingga orang tuanya memberikan peluang untuk si anak mengemudi dijalan sendiri pergi kesekolahnya. Banyak pelanggaran Hukum yang disebabkan oleh anak-dibawah umur, pelanggaran yang disebabkan oleh anak dibawah umur bukan hal yang ringan, namun bisa mengakibatkan timbulnya faktor yang sangat besar dalam lalu lintas.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Penggunaan Roda 2 oleh Pengemudi di jalan raya? 2) Bagaimana Peranan Kepolisian dalam Mengatasi Pengemudi di bawah Umur? 3) Bagaimana Peranan Kepolisian dalam Mengatasi Pengemudi di bawah Umur Presfektif Fiqih Siyasah?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Penggunaan roda 2 oleh pengemudi dibawah umur di Kabupaten Tuban didominasi oleh anak-anak sekolah yang secara umur belum mumpuni untuk mengemudi di jalan raya. 2) Peran Kepolisian dalam Penggunaan Roda 2 oleh Pengemudi di jalan raya yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah-sekolah untuk mengupayakan peningkatan keamanan pengguna roda dua jalan di Kabupaten Tuban. 3) Peningkatan ketertiban terutama Kabupaten Tuban ditinjau dari *Fiqih Siyasah* adalah untuk merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum islam artinya semua sistem dibangun atas dasar prinsip umum yang mengakomodir sistem apapun yang mampu merealisir kepentingan publik dengan pedoman pada hukum islam.

## ABSTRACT

Jauhary, Jund Robby Syaja' Al, 12103193165, Implementation of Police Policy in Taking Action against Underage Drivers in Tuban Regency Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Legal Sciences, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University, 2023, Supervisor Satrio Wibowo, M.H.

Keywords: Policy, Police and Drivers

This research is motivated by the increasing needs and developments of the times which provide room for movement in meeting life's needs. Two-wheeled riders are not only driven by people who are fit to drive but also underage children who are not yet fit to drive and can be found in various areas, such as school children who travel long distances without being accompanied by their parents due to various factors, so His parents gave the child the opportunity to drive on his own road to go to school. Many violations of the law are caused by minors. Violations caused by minors are not light, but can result in very big factors in traffic.

The focus of this research is: 1) How do drivers use 2 wheels on the road? 2) What is the Role of the Police in Dealing with Underage Drivers? 3) What is the Role of the Police in Dealing with Drivers under the Prescriptive Age of Fiqh Siyasah? The research method used is a juridical-empirical method using a qualitative approach.

The results of this research show that: 1) The use of 2-wheelers by underage drivers in Tuban Regency is dominated by school children who are not yet qualified to drive on the highway. 2) The role of the Police in the use of two-wheeled vehicles by drivers on highways is to provide outreach to the community and schools to improve the safety of two-wheeled road users in Tuban Regency. 3) Improving order, especially in Tuban Regency, in terms of Fiqh Siyasah, is to realize the public interest while adhering firmly to the rules of Islamic law, meaning that all systems are built on the basis of general principles that accommodate any system that is able to realize the public interest guided by Islamic law.